



**SELAMAT DATANG**

rumah pintar -  
**pemil** 

**Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**



KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

PERIODE 2017 - 2022



ARIEF BUDIMAN, S.S., S.I.P., M.B.A.  
Ketua KPU



PRAMONO UBAID TANTHOWI, M.A.  
Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik



WAHYU SETIAWAN, S.I.P., M.Si.  
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM



HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.  
Divisi Hukum dan Pengawasan



ILHAM SAPUTRA, S.I.P.  
Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu



VIRYAN, S.E., M.M.  
Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga



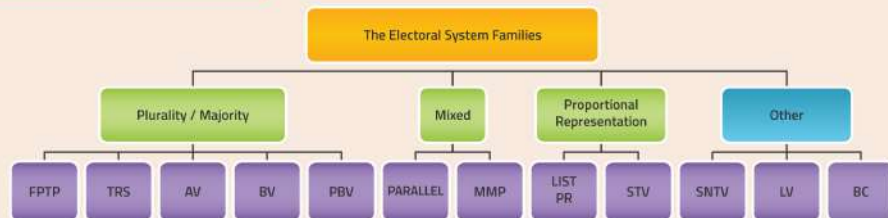
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, M.SP.  
Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi

## SISTEM PEMILIHAN UMUM DI DUNIA



Sistem Pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia sangat variatif. Sebuah negara dengan karakter demografis dan geografis yang sama belum tentu menganut sistem Pemilu yang sama. Negara yang menganut bentuk dan sistem pemerintahan yang sama belum tentu juga mengadopsi sistem Pemilu yang sama, demikian pula sebaliknya.

### Rumpun Sistem Pemilu



Sumber: Aronson Reynolds, et al. Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, IDEA, Sweden, 2009, hal. 28

### 1. *Plurality/Majority System* (Sistem Pluralitas/Mayoritas)

Disebut juga sistem distrik. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *Block Vote* dan *Party Block Vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Varian dari sistem ini adalah *First Past the Post*, *Alternative Vote*, *Two Round System* dan *Block Vote*.

### 2. *Proportional System* (Sistem Proporsional)

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh Partai Politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Varian dari sistem ini adalah *Proporsional Representation* dan *Transferable Vote*.

### 3. Sistem Campuran

Merupakan perpaduan penerapan antara *Plurality/Majority System* dan *Proportional System*. Varian dari sistem ini adalah *Parallel System* dan *Mix Member Proportional*.



## **PENTINGNYA PEMILU DAN DEMOKRASI**

**1**

**Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya**

**2**

**Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai**

**3**

**Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat**

**4**

**Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya Negara**





# SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

"Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum, brecht, peraturan perundang-undangan haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghapusan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia terlepaskan kedaulatan rakyat". (Ratna, 1932)

Sumber: WISNARDI, DAN PERWATAMA, BANGSA. *Asas Teori Hukum*. 11 (1984). "Teori dan Aplikasi Hukum Negara" (1984). Bandung: Citra



## PERIODE SOEKARNO (Pemilu 1955)

Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan (17 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memantapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Tanggal 3 November 1945 menjadi Hariumpah 2 atau Hariumpah Soekarno Hatta, menandakan pembentuhan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1955. Muktamad 2 merupakan partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya yaitu Partai Nasional dan Soeng.

Amatiah Muktamad 2 kelas pembentuhan partai-partai politik adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946. Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena:

- Tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu
- Rendahnya stabilitas keamanan negara
- Pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan

## Pemilu 1955

Mencapainya Pemilu Nasional pertama di Indonesia. Diakukakan untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota Konstituante (23 Desember 1955).



Manusia dan sejarah pemilu

## Demokrasi Terpimpin dan Berakhirnya Periode Soekarno

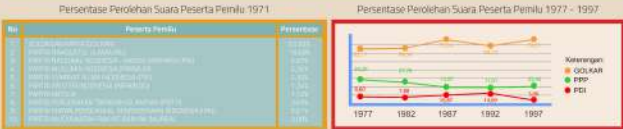
Pada 3 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden UUD 1945. Diambilnya sebagai Dasar Negara Konstitusional dan DPR hasil Pemilu dibubarkan diganti dengan DPR-GR. Hal ini diganti dengan kabinet Dzateng Haryono. Ketua DPR, MPR, BPK dan IVA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Untuk menjalankan politik nasional sebagai Ketua MPRS, tentara Pribadi Presiden Soekarno yang bersuara diawasi pada Sidang Umum IV-IV tanggal 22 Juni 1959.



## PERIODE SOEHARTO (Pemilu 1971 - 1997)

Pada pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soekarno diturunkan menjadi Presiden seumur hidup (orang pertama) yang menjabat pada 12 Maret 1968 dan tanggal 27 Maret 1968. Soekarno diturunkan menjadi Presiden seumur hidup (orang pertama) yang menjabat pada 12 Maret 1968 dan tanggal 27 Maret 1968. Soekarno diturunkan menjadi Presiden seumur hidup (orang pertama) yang menjabat pada 12 Maret 1968 dan tanggal 27 Maret 1968.

TAHUN PEMILU	PERISTIWA
1971	Pada Pemilu 1971, Golkar berhasil meraih persentase 60% dan menggapai absolute majority. Hasil Pemilu 1971 menunjukkan Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan persentase suara 62,25, diikuti PKI (13,88%), PNI (9,34%) dan Burhan (10,53%).
1977-1997	Pada Pemilu 1977, diadakan Pemilu dua kali, di Partai Politik menjadi 4 Partai Politik, yaitu Golkar (1971-1997), Partai Persatuan Pelajar (1977-1997), Partai Buruh (1977-1997), Partai Persatuan Mahasiswa (1977-1997). Pemilu dilaksanakan di DPR, Golkar dan PKI yang dipertahankan hingga Pemilu 1997. Golkar sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997. Golkar meraih Partai Sejahtera (1997-1997) dan Partai Sejahtera (1997-1997).



Tahun 1995, Soeharto digantikan oleh B. Habibie sebagai penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Ditandai dengan MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001.

## PERIODE REFORMASI (Pemilu 1999 - sekarang)

Pada pemerintahan Presiden Soekarno, Wakil Presiden B. Habibie diangkat menjadi Presiden RI pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan B. Habibie, Pemilu yang pertama dilaksanakan tahun 2000 disertai pelaksanaan MPR pada tahun 1998.

PERIODE ANGGOTA DPR, DPD dan DPRD	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilu pertama pada masa reformasi</li> <li>Partai: 48 Partai Politik</li> <li>Pelaksanaan: 7 Juni 1999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptasi Muktamad dengan Megawati Sukarnoputri dipilih dan ditetapkan oleh MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI</li> <li>Diadakan sidang umum UUD - Megawati Sukarnoputri (dapat diakui oleh sebagian Megawati Sukarnoputri - Hartono) Had Sidang istimewa MPR RI, 23 Juli 2001, melalui Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilu pertama pada perubahan amandemen UUD 1945. Terjadi perubahan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Presiden dipilih secara langsung</li> <li>Dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD)</li> <li>Hadiah Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Kartu Pemilihan Umum)</li> </ol> </li> <li>Partai: 26 Partai Politik</li> <li>Pelaksanaan: 5 April 2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan: 5 Juli 2004 (sidang I)</li> <li>Partai: 26 Partai Politik</li> <li>Sidang Sidang istimewa UUD sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 - 2009</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partai: 44 Partai Politik (38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh)</li> <li>Pelaksanaan: 9 April 2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan: 8 Juli 2009 (1 putaran)</li> <li>Partai: 26 Partai Politik</li> <li>Sidang Sidang istimewa UUD sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009 - 2014</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Partai: 15 Partai Politik (12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Lokal Aceh)</li> <li>Pelaksanaan: 9 April 2014 (sidang I) - 30 April 2014 (sidang II)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan: 9 Juli 2014</li> <li>Partai: 26 Partai Politik</li> <li>Sidang Sidang istimewa UUD sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 - 2019</li> </ul>



## PESERTA PEMILU

TAHUN PELAKSANAAN	PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD				PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pemilu 1955	<b>Pemilu Anggota DPR</b> Pelaksanaan: 29 September 1955		<b>Peserta:</b> 36 Partai Politik 34 Ormas 48 Perorangan	<b>Partai Pemenang:</b> 1. PNI 2. MASYUMI 3. NU	<b>Tidak ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b> Soekarno dan Mohammad Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
	<b>Pemilu Anggota Konstituante</b> Pelaksanaan: 25 Desember 1955		<b>Peserta:</b> 39 Partai Politik 23 Ormas 29 Perorangan		
Pemilu 1971	<b>Pelaksanaan:</b> 5 Juli 1971		<b>Peserta:</b> <b>10</b> Partai Politik	<b>Partai Pemenang:</b> 1. GOLKAR 2. NU 3. PNI	<b>Tidak ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b> Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI oleh MPR RI
Pemilu 1977-1997	<b>Pelaksanaan:</b> 1977 : 2 Mei 1977 1982 : 4 Mei 1982 1987 : 23 April 1987 1992 : 9 Juni 1992 1997 : 29 Mei 1997		<b>Peserta:</b> <b>3</b> Partai Politik	<b>Partai Pemenang:</b> 1. GOLKAR 2. PPP 3. PDI	<b>Tidak ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b> Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan ditetapkan oleh MPR RI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 1977: Soeharto dan Adam Malik</li> <li>• Tahun 1982: Soeharto dan Umar Wirahadikusumah</li> <li>• Tahun 1987: Soeharto dan Soedharmono</li> <li>• Tahun 1992: Soeharto dan Try Sutrisno</li> <li>• Tahun 1997: Soeharto dan BJ. Habibie</li> </ul>
Pemilu 1999	<b>Pelaksanaan:</b> 7 Juni 1999		<b>Peserta:</b> <b>48</b> Partai Politik	<b>Partai Pemenang:</b> 1. PDI Perjuangan 2. GOLKAR 3. PPP	<b>Tidak ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b> Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan ditetapkan oleh MPR RI <b>Presiden dan Wakil Presiden terpilih:</b> Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri
Pemilu 2004	<b>Pelaksanaan:</b> 5 April 2004		<b>Peserta:</b> <b>24</b> Partai Politik	<b>Partai Pemenang:</b> 1. GOLKAR 2. PDI Perjuangan 3. PKB	<b>Putaran I (5 Juli 2004)</b> Peserta: 5 pasangan calon 1. Wiranto dan Salahuddin Wahid 2. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi 3. Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo 4. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla 5. Hamzah Haz dan Agum Gumelar  <b>Putaran II (20 September 2004)</b> Peserta: 2 pasangan calon 1. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla 2. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi  <b>Presiden dan Wakil Presiden terpilih:</b> Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla
Pemilu 2009	<b>Pelaksanaan:</b> 9 April 2009		<b>Peserta:</b> <b>38</b> Partai Politik Nasional <b>6</b> Partai Lokal Aceh	<b>Partai Pemenang:</b> 1. DEMOKRAT 2. GOLKAR 3. PDI Perjuangan	<b>Pelaksanaan: 8 Juli 2009</b> Peserta: 3 pasangan calon 1. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto 2. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono 3. Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto
Pemilu 2014	<b>Pelaksanaan:</b> 9 April 2014		<b>Peserta:</b> <b>12</b> Partai Politik Nasional <b>3</b> Partai Lokal Aceh	<b>Partai Pemenang:</b> 1. PDI Perjuangan 2. GOLKAR 3. DEMOKRAT	<b>Pelaksanaan: 9 Juli 2014</b> Peserta: 2 pasangan calon 1. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa 2. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla



## STRUKTUR ORGANISASI KPU

### KPU RI

- Berkedudukan di Ibu Kota Negara
- Anggota: 7 orang
- Masa keanggotaan 5 tahun
- Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal



### KPU PROVINSI

- Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
- Anggota: 5 orang
- Masa keanggotaan 5 tahun
- Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat



### KPU KABUPATEN/KOTA

- Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota
- Anggota: 5 orang
- Masa keanggotaan 5 tahun
- Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat



*ad hoc*

### PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan
- Anggota: 5 orang
- Dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu, dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara
- Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat



*ad hoc*

### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

- Berkedudukan di Desa atau nama lain/Kelurahan
- Anggota: 3 orang
- Dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu, dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara
- Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat



*ad hoc*

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

- Anggota: 7 orang
- Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kab/Kota
- Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua (merangkap anggota) dan anggota

## PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI LUAR NEGERI

*ad hoc*

### PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)

- Berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia
- Anggota: paling sedikit 3 orang, paling banyak 7 orang (berasal dari masyarakat Indonesia)
- Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai wilayah kerjanya
- Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua (merangkap anggota) dan anggota



*ad hoc*

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN)

- Anggota: paling sedikit 3 orang, paling banyak 7 orang (berasal dari masyarakat Indonesia)
- Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPLN atas nama Ketua KPU
- Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua (merangkap anggota) dan anggota





# PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## PRESIDEN RI

## WAKIL PRESIDEN RI



SOEKARNO  
(1945 - 1967)

MOHAMMAD HATTA  
(1945 - 1956)



SRI SULTAN  
HAMENGKUBUWONO IX  
(1973 - 1978)



SOEHARTO  
(1967 - 1998)

ADAM MALIK  
(1978 - 1983)



UMAR  
WIRAHADIKUSUMAH  
(1983 - 1988)



SUDHARMONO  
(1988 - 1993)



TRY SUTRISNO  
(1993 - 1998)



BJ. HABIBIE  
(1998)



BJ. HABIBIE  
(1998 - 1999)



ABDURRAHMAN  
WAHID  
(1999 - 2001)

MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI  
(1999 - 2001)



MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI  
(2001 - 2004)

HAMZAH HAZ  
(2001 - 2004)



SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO  
(2004 - 2014)

MUHAMMAD JUSUF KALLA  
(2004 - 2009)



BOEDIONO  
(2009 - 2014)



JOKO WIDODO  
(2014 - 2019)

MUHAMMAD JUSUF KALLA  
(2014 - 2019)







# PENYELENGGARA PEMILU

## PPI (Panitia Pemilihan Indonesia)



PPI menyelenggarakan Pemilihan anggota DPR dan Konstituante tahun 1955 dan berkedudukan di tingkat pusat.

Beranggotakan 5 - 9 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden



Panitia Pemilihan tingkat Provinsi beranggotakan 5 - 7 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman

Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten beranggotakan 5-7 orang, diangkat & diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953

## LPU (Lembaga Pemilihan Umum)

LPU menyelenggarakan Pemilu sejak tahun:



diketahui oleh Menteri Dalam Negeri

Panitia Pemilihan Indonesia untuk tingkat pusat

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk Provinsi

Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk Kabupaten/kota

Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih

Sumber: Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969

## KPU (Komisi Pemilihan Umum)

KPU menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang



Pada Pemilu 1999 anggota KPU terdiri dari 48 wakil partai politik peserta pemilu dan 5 orang wakil pemerintah

KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia untuk melaksanakan pemilu anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintah

Sumber: Keppres Nomor 16 tahun 1999



Sejak Pemilu 2004, KPU bersifat **NASIONAL, TETAP DAN MANDIRI** (Tidak ada perwakilan dari Pemerintah atau partai politik)

Landasan hukum:

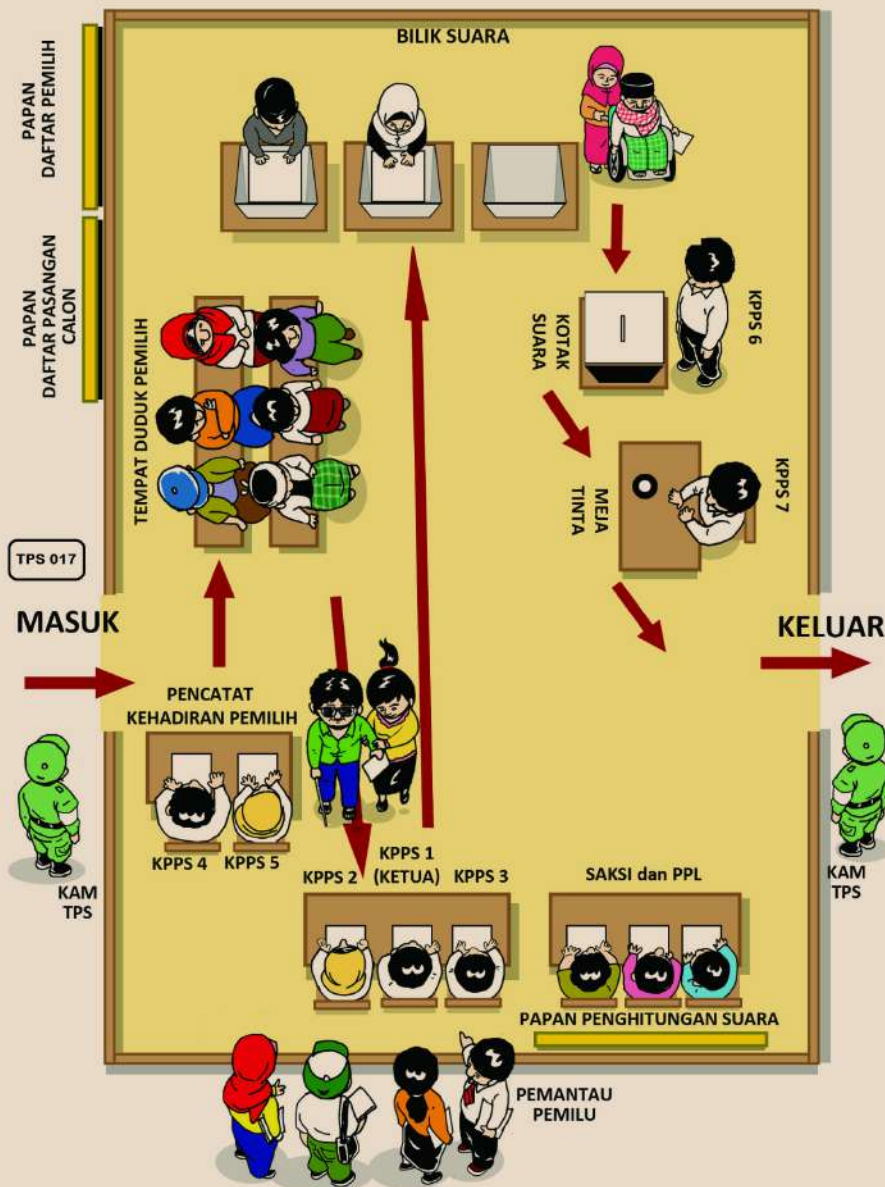
- Amandemen ketiga UUD 1945 tanggal 9 November 2001 Pasal 22E ayat (5): *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*
- Keppres No. 70 tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001: KPU bersifat independen dan non-partisan

Pada Pemilu 2004, pembentukan keanggotaan KPU melalui pengusulan Presiden kepada DPR

Sejak Pemilu 2009, pembentukan keanggotaan KPU melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi dan *fit and proper test* oleh DPR RI



# DENAH PEMUNGUTAN SUARA



Ilustrasi: Denah Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015